

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	5
C. Perumusan Masalah	12
D. Kerangka Dasar Teori	12
E. Hipotesa	19
F. Metodologi Penelitian	20
G. Jangkauan Penelitian	21
H. Tujuan Penelitian	21
I. Sistematika Penulisan	22

BAB II DINAMIKA POLITIK DAN EKONOMI DI SERBIA

A. Dinamika Politik	25
A.1. Kondisi Wilayah Serbia	25
A.2. Sejarah Serbia	26
A.3. Sistem Politik dan Pemerintahan Serbia	31
B. Dinamika Ekonomi Serbia	33
C. Perluasan Keanggotaan Uni Eropa dan Kondisi (syarat) untuk menjadi anggota Uni Eropa .	43
C.1. Perluasan Uni Eropa	43

C.2. Kriteria Kopenhagen	60
C.2.1. Kopenhagen dalam bidang politik	64
C.2.2. Kopenhagen dalam bidang ekonomi	65
C.2.3. Kopenhagen dalam bidang	
Yudikatif	67
BAB III UPAYA DAN KEBIJAKAN YANG DIAMBIL SERTA HAMBATAN	
YANG DIHADAPI PEMERINTAH SERBIA DALAM BIDANG	
EKONOMI UNTUK MENJADI ANGGOTA UNI EROPA ..	69
A. Upaya dan Kebijakan yang diambil pemerintah	
Serbia dalam mengatasi hambatan ekonomi ..	71
B. Hambatan Ekonomi yang dihadapi pemerintah	
Serbia	84
BAB IV UPAYA DAN KEBIJAKAN YANG DIAMBIL SERTA HAMBATAN	
YANG DIHADAPI PEMERINTAH SERBIA DALAM BIDANG	
POLITIK UNTUK MENJADI ANGGOTA UNI EROPA ..	89
A. Upaya dan Kebijakan yang diambil pemerintah	
Serbia dalam mengatasi hambatan politik .	90
B. Hambatan Politik yang dihadapi pemerintah	
Serbia	98
BAB V KESIMPULAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Studi pokok dalam ilmu hubungan internasional yang menarik untuk dikaji salah satunya adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan salah satu obyek kajian yang penuh dengan fenomena politik, ekonomi, sosial, budaya dan militer yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Budiono membagi kerjasama internasional menjadi empat bentuk yaitu: Kerjasama Global, Kerjasama Regional, Kerjasama Fungsional dan kerjasama Ideologis. Uni Eropa (*European Union*) merupakan salah satu bentuk kerjasama regional yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Pengertian dari kerjasama regional itu sendiri yaitu merupakan kerjasama antar negara yang secara geografis letaknya berdekatan yang bergerak dalam segala bidang.¹

Uni Eropa adalah organisasi regional di negara-negara Eropa yang memberi jaminan perdamaian dan

¹ R. Soeprapto, *Hubungan Internasional Sistem, Interaksi dan Perilaku*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal 183.

stabilitas di antara negara-negara anggotanya. Keberhasilan Uni Eropa dalam meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas politik di negara-negara Uni Eropa serta adanya *Treaty of Amsterdam* pada 17 Juni 1997, telah membuka kesempatan dan mendorong keinginan negara-negara non anggota, termasuk Serbia untuk melamar dan bergabung menjadi anggota Uni Eropa.

Berbagai macam upaya telah dilakukan oleh pemerintah Serbia agar dapat diterima dalam keanggotaan Uni Eropa, baik dalam bidang ekonomi maupun bidang politik. Di antaranya yaitu memulihkan politik dan perekonomian Serbia yang belum stabil, dengan cara mengambil beberapa kebijakan serta pengadopsian beberapa undang-undang yang sesuai dengan persyaratan Uni Eropa.

B. Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya Perang Dingin, banyak terjadi perubahan mendasar dalam kebijakan luar negeri umumnya negara-negara di dunia. Hal ini terjadi pula dalam keanggotaan Uni Eropa (European Union) yang sebelumnya hanya 15 negara anggota menjadi 27 negara anggota. Pada awal pembentukannya, Uni Eropa bergerak dalam penyatuan

ekonomi namun dalam perkembangannya Uni Eropa bergerak meluas ke segala bidang kehidupan negara. Uni Eropa merupakan organisasi regional yang mempunyai cita-cita untuk menyatukan kembali benua Eropa ke dalam satu kesatuan.

Negara-negara Uni Eropa yang sejak tahun 1967 telah bersatu adalah Belgia, Perancis, Jerman Barat, Italia, Luxemburg dan Belanda; kemudian pada tahun 1973 Denmark, Inggris dan Irlandia bergabung ke dalam Uni Eropa dan disusul dengan Yunani pada tahun 1981, kemudian Portugal dan Spanyol pada tahun 1986 dan yang terakhir adalah Austria, Finlandia dan Swedia yang bergabung pada tahun 1995. Semua negara anggota Uni Eropa di atas telah berhasil melewati serangkaian kontroversi dan masalah-masalah tertentu sehingga negara-negara tersebut akhirnya dapat bergabung ke dalam Uni Eropa.

Uni Eropa merupakan organisasi supranasional di bidang ekonomi dan politik yang saat ini sedang berambisi untuk menambah kekuasaannya melalui perluasan keanggotaan dan akan dilakukan ke negara-negara Eropa Timur, Eropa Tengah dan negara-negara Balkan. Sejak akhir 1900-an, Uni Eropa telah mempertimbangkan untuk memperluas

kekuasaannya di daerah Balkan. Hal ini semakin jelas terlihat di tahun 2003, ketika Uni Eropa secara resmi menyatakan bahwa negara-negara Balkan merupakan negara-negara kandidat yang potensial untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa.

Ambisi Uni Eropa untuk memperluas wilayahnya, bertujuan untuk menyatukan kembali benua Eropa guna mengkonsolidasikan perdamaian dan demokrasi bagi kemajuan dan kesejahteraan yang dihasilkan oleh integrasi Eropa. Integrasi Eropa dimulai dari pembentukan kerjasama pasar bersama dalam sektor batu bara dan baja (*European Coal and Steel Community* (ECSC) pada tahun 1951. Kemudian ide ini di ikuti dengan lahirnya *European Atomic Energy Community* (EAEC/*Euratom*) dan *European Economic Community* (EEC) pada tahun 1957.

Ketiga organisasi ini secara kolektif dikenal sebagai *European Community* (EC). Dengan ditandatanganinya *Treaty on European Union* (TEU) pada tanggal 7 Februari 1992 di Maastricht dan mulai berlaku 1 November 1993, telah mengubah *European Community* (EC) menjadi *European Union* (EU).

Selain itu, Uni Eropa lebih dari sekedar menjelaskan entitas "Eropa" yang mengembangkan institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial lintas batas negara, bangsa serta menjangkau individu. Organisasi ini tercipta karena adanya kerjasama antara pemerintah-pemerintah nasional dan bukan hanya sekedar sebuah asosiasi negara regional. Uni Eropa diharapkan dapat membantu negara-negara anggotanya untuk menjadi negara yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan pertolongan serta bantuan umum negara-negara anggota, maka kesuksesan Uni Eropa berdasarkan nilai-nilai demokratis, perlindungan Hak Asasi Manusia, garis hukum dan kaum minoritas dapat tercipta.²

Keberhasilan Uni Eropa dalam meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas politik di negara-negara Uni Eropa serta adanya *Treaty of Amsterdam* pada 17 Juni 1997, telah membuka kesempatan dan mendorong keinginan negara-negara non anggota, untuk melamar dan bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Runtuhnya komunisme menggusur batas-batas ideologis dan negara-negara baru di Eropa Timur dan Eropa Tengah, termasuk Serbia. Negara-negara baru

² "The Enlargement of the European Union", dalam <http://www.auswaetirge-amt.de>, diakses tanggal 6 Juni 2010.

tersebut mulai menyadari bahwa keanggotaan dalam masyarakat Eropa merupakan kunci utama untuk bergabung kembali dan bekerjasama dengan Eropa.

Pemerintah Serbia telah mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa pada 22 Desember 2009 lalu.³ Hal ini dikarenakan hubungan baik antara Serbia dengan Uni Eropa yang telah terjalin cukup lama. Hal ini terbukti dari Uni Eropa yang telah banyak memberikan bantuan keuangan kepada Serbia. Selain itu juga, Uni Eropa memberikan dukungan dalam proses dialog antara Serbia dan Bosnia, guna mencari solusi bagi kedua belah pihak dalam menyelesaikan konflik melalui perundingan Lisabon pada tahun 1992. Uni Eropa juga telah membantu proses dialog antara Serbia dan Kosovo dalam memperbaiki hubungan di antara kedua belah pihak pasca terjadinya konflik.

Namun beberapa negara anggota di antaranya Inggris dan Belanda, keberatan dengan pengajuan diri pemerintah Serbia tersebut terkait kejahatannya di masa lalu. Hal ini dapat dilihat dari sikap parlemen Inggris dan Belanda yang menolak untuk meratifikasi Perjanjian Stabilisasi

³ "Serbia Melamar Jadi Anggota Uni Eropa, Dua Penjahat Perang Harus Ditangkap", dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/eropa/2009/12/22/brk,20091222-215192,id.html>, diakses 7 Novermber 2010.

dan Asosiasi Serbia dengan Uni Eropa, karena kerjasama antara pemerintah Serbia dengan ICTY tidak menunjukkan adanya perkembangan dalam penangkapan penjahat perang. Oleh sebab itu, Inggris dan Belanda mengajukan beberapa persyaratan terhadap pemerintah Serbia sehingga langkah pemerintah Serbia untuk menjadi anggota Uni Eropa sedikit terhambat.⁴ Adapun persyaratan yang diajukan Inggris dan Belanda yaitu, harus mau kembali bekerjasama dengan tim penyelidikan pengadilan kejahatan perang PBB untuk bekas Yugoslavia (ICTY- *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*) untuk menangkap para penjahat perang yang terlibat dalam konflik Srebrenica dan menyerahkannya ke pengadilan internasional. Namun demikian, berbagai macam upaya dilakukan Pemerintah Serbia untuk mendapat dukungan dari seluruh negara anggota Uni Eropa, agar dapat masuk dalam keanggotaan Uni Eropa.

Harapan Serbia setelah resmi menjadi negara anggota Uni Eropa mencakup kepentingan di beberapa bidang. Di antaranya yaitu bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi yaitu berupa peningkatan volume ekspor atau

⁴ "Serbia Serahkan Permintaan Resmi Jadi Anggota Uni Eropa", dalam <http://www.epochtimes.co.id/internasional.php?id=694>, diakses 9 November 2010

perluasan perdagangan dan peningkatan arus investasi asing ke Serbia yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Serbia secara umum. Dalam bidang politik, keanggotaan Serbia dalam Uni Eropa diharapkan dapat memperkuat proses konsolidasi demokrasi, stabilitas politik domestik serta memperkuat posisi internasional Serbia, sehingga dapat menata kembali hubungan bilateral dengan negara tetangga yang nantinya akan dapat meningkatkan hubungan kerjasama dengan negara lain.

Identitas ke-Eropaan masing-masing negara kandidat dinilai dari dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, serta negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya.

Persyaratan tersebut juga lebih dikenal sebagai kriteria Kopenhagen yang dirumuskan oleh Dewan Eropa pada bulan Juli 1993. Pelaksanaan atas KTT Kopenhagen menggunakan strategi pertemuan regular antara Uni Eropa dengan negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah. Pertemuan tersebut dilakukan pada level yang berbeda-beda dengan menggunakan seperangkat aturan untuk menyelaraskan

ekonomi dan sistem hukum mereka, sesuai aturan pasar internasional dan pemberian bantuan finansial. Adapun isi dari kriteria Kopenhagen tersebut yaitu:⁵

1. Stabilitas dari lembaga-lembaga yang menjamin demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia serta rasa hormat dan perlindungan terhadap golongan minoritas (kriteria politik).
2. Adanya ekonomi pasar yang berjalan maupun kemampuan untuk mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan-kekuatan pasar dalam wilayah Uni Eropa (kriteria ekonomi).
3. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota yaitu mampu memenuhi tujuan dari penyatuan politik, ekonomi dan moneter (kriteria mengenai pengadopsian perundang-undangan masyarakat Eropa).

Dengan adanya kriteria yang telah diberikan oleh Uni Eropa, membuat negara-negara kandidat termasuk Serbia, harus dapat memenuhi kriteria tersebut agar dapat menjadi anggota Uni Eropa secara penuh. Dengan memenuhi

⁵ "European Union Enlargement - A Historic Opportunity", dalam <http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm>, diakses 7 November 2010.

persyaratan, berarti negara tersebut telah memiliki identitas Eropa.

Serbia merupakan salah satu negara pelamar yang berasal dari negara bekas Yugoslavia selain Kroasia, Macedonia dan Montenegro. Sebenarnya sejak bulan Juni 2001, Dewan Eropa berpendapat bahwa Serbia merupakan salah satu negara calon anggota yang potensial untuk akses Uni Eropa. Namun pemerintah Serbia sendiri baru mulai mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa secara resmi pada 22 Desember 2009 lalu.⁶ Hal ini dikarenakan adanya beberapa hambatan dari beberapa negara anggota Uni Eropa yang merasa keberatan dengan masuknya Serbia terkait permasalahan Serbia dengan beberapa negara tetangganya di masa lalu. Di antaranya yaitu Inggris dan Belanda.

Negosiasi mengenai keanggotaan Serbia baru dimulai pada tahun 2004. Pada bulan Oktober 2004 sampai Oktober 2005, Dewan Eropa menyimpulkan membuka proses dan meluncurkan proses negosiasi perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi kepada Serbia. Setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 3 Mei 2006 negosiasi perjanjian Stabilisasi dan

⁶ *Ibid*, hal 2.

Asosiasi tersebut dibatalkan karena kurangnya kemajuan kerjasama antara pemerintah Serbia dengan ICTY terkait penangkapan para penjahat perang. Namun setahun kemudiannya lagi, pemerintah Serbia menegaskan kembali kerjasamanya dengan ICTY, maka negosiasi perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi kembali diadakan.

Pada tanggal 29 April 2008, Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) serta Perjanjian Sementara Perdagangan dan isu-isu terkait antara Serbia dan Uni Eropa ditandatangani di Luxembourg.⁷ Pada tanggal 9 September 2008, Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) serta Perjanjian Sementara Perdagangan dan isu-isu terkait, diratifikasi oleh Majelis Nasional Serbia. Pada 1 Januari 2009, pemerintah Serbia mengimplementasikan Perjanjian Perdagangan Sementara dengan Uni Eropa.

Komisi Eropa memutuskan untuk menempatkan Serbia dalam daftar perjanjian Schengen, tanggal 30 November 2009. Lalu pada tanggal 7 Desember 2009, Komisi Eropa memutuskan untuk menerapkan kesepakatan Perdagangan Interim dengan Serbia. Setelah berbagai upaya dilakukan

⁷ "Aksesinya Serbia ke Uni Eropa" dalam http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidate-countries/serbia/eu_serbia_relations_en.htm, diakses 15 Juni 2010.

oleh Serbia, akhirnya Serbia resmi menjadi negara calon anggota Uni Eropa pada 22 Desember 2009.⁸ Namun jika pemerintah Serbia benar-benar ingin menjadi anggota Uni Eropa, maka pemerintah Serbia harus sungguh-sungguh membuktikan diri kepada negara-negara anggota Uni Eropa dalam memenuhi semua persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas maka perumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah: "Bagaimana upaya pemerintah Serbia dan hambatan-hambatan apa yang harus dihadapi pemerintah Serbia untuk menjadi anggota Uni Eropa?"

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar yang digunakan untuk mengkaji kendala yang dihadapi pemerintah Serbia dan upaya internal Serbia agar diterima dalam keanggotaan Uni Eropa adalah konsep Kebijakan Publik. Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi

⁸ *Ibid*

tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Dimana hal ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktek-praktek sosial yang ada dalam masyarakat.⁹ Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan, begitupun sebaliknya.

Proses analisa kebijakan merupakan kegiatan pokok dalam perumusan kebijakan karena ia memberikan pijakan awal kenapa kebijakan harus dibuat. Dunn mendefinisikan analisa kebijakan sebagai disiplin ilmu sosial terapan yang menerapkan berbagai metode penyelidikan, dalam konteks argumentasi dan debat publik, untuk menciptakan secara kritis menaksir, mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dalam hal ini berarti, analisa kebijakan merupakan sebuah proses yang mendalam

⁹ AG Subarsono Msi, MA, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hal 3.

dari isu-isu sosial untuk dapat di kedepankan sebagai sebuah solusi yang lebih baik.¹⁰

Proses Analisis publik merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dapat terlihat dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas yang bersifat intelektual dapat terlihat dalam aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan.

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan dan sebagainya. Sedangkan aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembuatan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi

¹⁰ Riant Nugroho Dwijowijoyo, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hal 86-87.

adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), Presiden (eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk ke dalam pemeran serta tidak resmi adalah kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu.¹¹

Menurut Richard C. Snyder mengatakan para pembuat keputusan mengambil keputusan untuk mencapai sebuah tujuan yang dapat menguntungkan negara dan mengutamakan kepentingan nasional, baik maksud dan tujuannya adalah tindakan negara. Tindakan negara adalah tindakan yang diambil oleh mereka yang melakukan atas nama negara.¹² Dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Serbia agar dapat menjadi anggota Uni Eropa menandakan bahwa Serbia akan menggunakan asosiasi ini untuk mencapai kepentingannya.

Pemerintah Serbia memulai proses aksesi keanggotaan Uni Eropa sejak akhir tahun 1990-an ketika Uni Eropa mempertimbangkan untuk memperluas keanggotaan di daerah Balkan, dan memulai kerjasama dengan Uni Eropa pada tahun 1997 dimana Dewan Uni Eropa menetapkan persyaratan

¹¹ Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004, hal 84.

¹² James E. Dougherty and Robert L. Platzgraff, Jr, *Teori-teori Hubungan Internasional*, terjemahan M. Amien Rais, Haarwanto, Tulus Warsito, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1995, hal 373.

politik dan ekonomi kepada Serbia untuk pengembangan hubungan bilateral. Dengan dimulainya kerjasama tersebut, maka sejak saat itu Serbia telah memulai proses integrasinya dengan Uni Eropa yang tidak hanya dalam bidang ekonomi namun meluas kesegala bidang kehidupan negara Serbia.

Keinginan Serbia untuk berintegrasi dengan Uni Eropa sangat besar. Berintegrasi dengan Uni Eropa diharapkan memperoleh keuntungan-keuntungan seperti di bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Keuntungan di bidang ekonomi dimana Uni Eropa sangat berperan dalam menyatukan pasar dunia, dimana Serbia telah melakukan perdagangan dengan negara-negara Uni Eropa. Tahun 2006, ekspor dan impor Serbia mencapai jumlah 49% dan 53% dan meningkat menjadi 56% dan 54% di tahun 2007. Pada tahun 2007, jumlah investasi yang masuk ke Serbia yang berasal dari negara-negara Uni Eropa yaitu sebesar 2,3 miliar euro.¹³ Dengan karakteristik pasar internal Uni Eropa dimana persediaan, orang-orang, jasa dan modal begitu

¹³ "Hubungan Uni Eropa-Serbia", dalam http://ec.europa.eu/enlargement/potential-candidate-countries/serbia/eu_serbia_relations_en.htm, diakses 20 Februari 2011.

bersifat bebas, telah memberikan keuntungan bagi Serbia antara lain:

1. Total volume perdagangan seperti produktivitas ekspor barang-barang akan naik drastis dan memberikan keuntungan dalam skala ekonomi. Hal ini disebabkan ketika Uni Eropa melindungi persediaan barang-barang Serbia dimana faktor ini tidak hanya akan meningkatkan ekspor Serbia kepada negara lain, tetapi juga mengumpulkan investasi modal luar negeri ke dalam Serbia.
2. Munculnya perusahaan baru di Serbia, menghasilkan adanya kompetisi dan memberikan kontribusi yang berguna serta mengakhiri adanya monopoli yang secara teoritis ini akan menurunkan harga barang dan jasa.
3. Keseimbangan ekspor dan impor pada level individu dengan kualitas barang yang cukup tinggi.
4. Memberikan kerjasama secara langsung atau tidak langsung dalam bidang ekonomi, khususnya peluang bagi kewirausahaan dan konsumen.

5. Dengan menjadi anggota Uni Eropa, Serbia dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan dan politik Uni Eropa.

Konsekuensi sosial, memiliki ketergantungan pada banyak faktor yang berbeda-beda. Ketika Serbia masuk dalam keanggotaan Uni Eropa, mendapat tanggapan dari penduduk negara-negara anggota yang lain. Dengan berintegrasi dengan Uni Eropa, Serbia mendapat hak untuk secara bebas masuk dan hidup di daerah teritorial Uni Eropa, hak untuk bersuara dan menjadi kandidat untuk bergabung dengan penduduk Uni Eropa, hak untuk dilindungi oleh diplomatik dan institusi konsulat bagi setiap negara anggota.

Konsekuensi politik, partisipasi Serbia dalam Uni Eropa akan mempengaruhi keputusan Uni Eropa. Serbia memiliki komisi dan parlemen sendiri untuk masalah ini. Dengan demikian Serbia akan sangat mempengaruhi keputusan Uni Eropa. Integrasi ke dalam Uni Eropa, terhadap kebijakan luar negeri dan keamanan, dapat meningkatkan potensi kebijakan luar negeri Serbia dan membantu negara-negara tetangga. Ini menjadi kebijakan yang membawa keuntungan terhadap struktur birokrasi politik dan

kemungkinan perubahan informasi. Oleh karena itu, strategi Serbia akan sangat berperan dalam Uni Eropa.

Konsekuensi keamanan, berintegrasi dengan Uni Eropa Serbia akan mendapat perlindungan dari agresi negara lain. Pertumbuhan ekonomi juga akan mengurangi kontradiksi sosial, meningkatkan stabilitas sosial, meningkatkan demokrasi dan keamanan. Pertumbuhan yang drastis tidak hanya berpengaruh terhadap masalah sosial tetapi juga sistem keamanan negara, dimana adanya peningkatan hubungan antara Serbia dengan NATO. Dengan berintegrasi akan ada banyak masalah yang dapat teratasi seperti migrasi ilegal, organisasi kriminal dan terorisme.

Namun harapan dan proses integrasi Serbia untuk jadi anggota Uni Eropa sedikit terhambat. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kenadala yang harus dihadapi Pemerintah Serbia, baik dalam bidang ekonomi maupun politik. Seperti halnya ketidakstabilan ekonomi akibat adanya krisis global dan ketidakstabilan politik paska terjadinya konflik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, agar permohonan kenggotaan Serbia dan proses integrasi Serbia menuju keanggotaan Uni Eropa dapat berjalan lancar,

pemerintah Serbia terus berupaya untuk mengembalikan kepercayaan negara-negara anggota Uni Eropa dan masyarakat Internasional dengan cara memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Selain itu juga, pemerintah Serbia mengambil serta mengadopsi kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang sesuai dengan persyaratan keanggotaan Uni Eropa.

E. Hipotesa

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka dapat ditarik kesimpulan sementara atau hipotesa sebagai berikut :

Keberadaan Uni Eropa yang muncul menjadi aktor penting di kawasan Eropa, serta adanya *Treaty of Amsterdam* telah membuka kesempatan dan meyakinkan Serbia untuk mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa. Keinginan Serbia untuk menjadi anggota Uni Eropa dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi dan politik. Pemerintah Serbia terus berupaya agar permohonan keanggotaan Serbia dapat diterima dan proses integrasi

Serbia menuju keanggotaan Uni Eropa dapat berjalan lancar, yaitu dengan cara mengambil beberapa kebijakan ekonomi dan politik yang sesuai dengan persyaratan keanggotaan Uni Eropa. Namun proses integrasi Serbia untuk jadi anggota Uni Eropa sedikit terhambat. Adapun kendala atau hambatan yang harus dihadapi pemerintah Serbia untuk jadi anggota Uni Eropa yaitu mencakup bidang ekonomi dan politik.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:

- a. Metode pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber-sumber yang digunakan berupa buku-buku referensi, literatur, dokumentasi, hasil penelitian, jurnal dan penerbitan berkala, majalah dan surat kabar, pencarian data internet dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan obyek penelitian.
- b. Metode Analisis, yaitu teknik analisis deskriptif kaulitatif. Dengan metode ini penulis mencoba untuk memaparkan masalah-masalah melalui data-data yang

dikumpulkan untuk mendapatkan deskripsi yang sebenarnya dan apa adanya, kemudian menganalisisnya serta menarik hubungan-hubungan dari variabel-variabel yang ada, menginterpretasikannya dan kemudian menarik kesimpulan. Adapun variabel-variabel tersebut adalah dependen variabel (variabel yang terpengaruh) dan independen variabel (variabel yang mempengaruhi).

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian untuk menyusun skripsi ini dibatasi dari tahun 2009, dimana Serbia resmi mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa pada bulan Desember, sampai tahun 2011, dimana pemerintah Serbia berhasil menangkap dua penjahat perang yaitu Ratko Mladic dan Goran Hadzic. Selain itu, penelitian ini juga mencakup kejadian ditahun-tahun sebelumnya yang masih dianggap relevan.

H. Tujuan Penelitian

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Serbia serta hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Serbia

dalam memenuhi persyaratan untuk jadi anggota Uni Eropa, dimana Uni Eropa berperan penting untuk memperbaiki keadaan politik dan ekonomi Serbia.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I, merupakan pendahuluan yang mencakup alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka dasar teori, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II, membahas tentang Dinamika politik dan ekonomi di Serbia dan perkembangannya, untuk memenuhi persyaratan keanggotaan Uni Eropa serta perluasan keanggotaan Uni Eropa.
- Bab III, membahas tentang upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Serbia serta hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Serbia dalam bidang ekonomi untuk menjadi anggota Uni Eropa.

- Bab IV, membahas tentang upaya-upaya dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Serbia serta hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah Serbia dalam bidang politik untuk menjadi anggota Uni Eropa.
- Bab V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari skripsi ini.

BAB II

DINAMIKA POLITIK DAN EKONOMI DI SERBIA

Negara Serbia merupakan Negara yang terletak di kawasan Eropa dan merupakan salah satu Negara pecahan Yugoslavia yang beribu kota di Belgrade. Selain itu, Serbia merupakan salah satu Negara sedang berkembang yang mempunyai harapan untuk dapat menjadi anggota Uni Eropa.

A. Dinamika Politik

A.1. Kondisi Wilayah Serbia

Serbia memiliki luas wilayah mencapai 88.361 km persegi. Secara Geografis Republik Serbia memiliki perbatasan eksternal dengan Hungaria di utara, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro dan Kroasia di barat dan barat laut, Rumania ke utara-timur, Bulgaria ke tenggara, dan Kosovo dan Makedonia di selatan. Jumlah penduduk Serbia : 7.498.001 (berdasarkan sensus penduduk 2002, termasuk wilayah Kosovo-Metohija).

Struktur masyarakat di Serbia berdasarkan etnisnya, sangat beraneka ragam yaitu: Serbia asli 82,86%, Hongaria 3,91%, Bosnia 1,82%, Roma 1,44%, Montenegro 0,92%,

Yugoslavia 1,08%, Kroasia 0,94%, Albania 0,82% (berdasarkan sensus penduduk 2002). Mayoritas penduduk beragama Kristen Serbia Ortodoks, Roma Katolik, dan Islam.¹⁴

Bahasa nasionalnya adalah Serbia. Ibukota Serbia adalah Belgrade. Bentuk pemerintahan Serbia adalah Demokrasi Parleментар. Dan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri.

A.2. Sejarah Serbia

Negara Serbia lahir di tahun 1817 menyusul pemberontakan Serbia kedua. Kemudian, negara ini memperluas wilayahnya ke selatan dengan menguasai Kosovo dan Metohija, Raška dan Macedonia di tahun 1912. Terakhir, Vojvodina (bekas salah satu daerah otonomi dalam propinsi Habsburg bernama Voivodship Serbia dan Tamiš Banat) memproklamasikan pemisahan dirinya dari Austria-Hungaria dan bergabung kembali dengan Serbia di tahun 1918. Perbatasan negara Serbia saat ini telah

¹⁴ "Serbia", dalam <http://www.kemlu.go.id/belgrade/Pages/CountryProfile.aspx?l=id>, diakses 6 Mei 2011.

ditetapkan, menyusul berakhirnya Perang Dunia Kedua ketika Serbia menjadi sebuah unit federal dalam Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Setelah berakhirnya perang Dunia II, Yugoslavia berganti pemerintahan yaitu pemerintahan Josip Broz Tito. Pada masa pemerintahan Tito, Yugoslavia memiliki hubungan yang erat dengan Uni Soviet.

Namun pada bulan Mei 1980, setelah Tito meninggal dunia tanpa sempat mempersiapkan pengganti yang kuat, kehidupan politik dan negara di Yugoslavia seakan-akan kehilangan arah. Negara yang kemudian dipimpin secara kolektif oleh suatu Badan Presidensi berjumlah 8 (delapan) orang yang diambil dari Presidium Partai beranggotakan 24 orang. Sistem Presidensi ini dalam praktek pengambilan keputusan sering berbenturan satu sama lain, sesuai dengan kepentingan masing-masing sehingga memperdalam perpecahan. Demikian juga pengaruh pimpinan Federal (Partai maupun Negara) semakin lemah sedangkan dipihak lain pengaruh kekuasaan Republik Bagian menjadi bertambah kuat. Kondisi tersebut memicu munculnya nasionalisme ke daerahan sempit yang mengarah kepada perpecahan nasional. Pada tahun 1991 Slovenia dan Kroasia

menarik anggotanya dari badan kolektif tersebut yang diikuti oleh wakil-wakil dari Republik Makedonia dan Bosnia-Herzegovina.

Puncak dari memburuknya situasi politik di Yugoslavia ialah ketika pada tanggal 15 Juni 1991 Slovenia dan Kroasia memproklamkan kemerdekaan dan kedaulatannya secara sepihak yang diikuti dengan pembentukan mata uang sendiri, termasuk pembentukan Angkatan Bersenjata dan penentuan tapal Batas wilayah negara sendiri.

Setelah itu Republik Bosnia-Herzegovina pada bulan Maret 1992 mengadakan referendum untuk menentukan sebagai negara merdeka atau tetap dalam Federasi. Referendum tersebut diambil alih oleh etnis Serbia di Bosnia karena Bosnia-Herzegovina dianggap telah mengadakan referendum sendiri dan memutuskan tetap bersatu dengan Yugoslavia, namun dua etnik lainnya tetap memaksakan kehendaknya untuk merdeka. Kemudian pada tanggal 6 April 1992, kelompok negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat memberikan pengakuan dengan segera kepada Republik Slovenia, Kroasia dan Bosnia-Herzegovina, tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik di wilayah-wilayah tersebut.

Dengan adanya pengakuan negara-negara lain kepada kemerdekaan Slovenia, Kroasia dan Bosnia-Herzegovina maka pada tanggal 27 April 1992 Serbia dan Montenegro membentuk Federasi Yugoslavia versi baru dengan nama Republik Federasi Yugoslavia (RFY).

Dalam perjalanan sejarahnya RFY tidak berjalan mulus. Persoalan-persoalan politik, ekonomi, dan sosial mengakibatkan Montenegro berusaha untuk berdiri sendiri sebagai suatu negara yang terlepas dari bayang-bayang kebesaran Serbia ataupun kelemahan RFY. Montenegro merasa seperti negara kelas dua dibandingkan dengan Serbia. Kebijakan-kebijaksanaan politik dalam maupun luar negeri RFY sering kali dirasakan kurang menguntungkan bagi Montenegro. Situasi ini juga dimanfaatkan oleh pihak Barat untuk memperlemah RFY, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Slobodan Milosevic. Akan tetapi negara-negara anggota Uni Eropa lebih mendukung kesatuan Serbia dan Montenegro dalam ikatan yang longgar.

Atas upaya Uni Eropa, perpecahan Serbia dan Montenegro untuk sementara waktu dapat dihindari dan diadakan perubahan nama dari RFY menjadi Uni Serbia-Montenegro. Namun setelah kurun waktu 3 tahun ternyata

bentuk negara Uni Serbia-Montenegro tidak dapat memenuhi kepentingan nasional kedua negara. Pada tanggal 21 Mei 2006 diselenggarakan Referendum Kemerdekaan Montenegro dengan hasil 55,5% rakyat Montenegro menghendaki lepas dari Uni Serbia-Montenegro untuk membentuk negara sendiri. Pada tanggal 3 Juni 2006, atas dasar hasil referendum, Montenegro memproklamkan kemerdekaannya.

Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Montenegro, maka pada tanggal 05 Juni 2006, dalam sidang luar biasa, Parlemen Serbia mendeklarasikan negara Republik Serbia dan memutuskan bahwa Republik Serbia merupakan penerus Negara Uni Serbia-Montenegro, dan mengambil wewenang negara Uni Serbia-Montenegro sesuai Piagam Konstitusional Uni Serbia-Montenegro.¹⁵

Serbia menjadi negara merdeka lagi di tahun 2006 setelah Montenegro meninggalkan Uni Negara Serbia dan Montenegro yang lahir setelah bubarnya Yugoslavia di era 1990-an.

¹⁵ "Sejarah Serbia", dalam <http://resorelami.com/2009/10/07/sejarah-serbia/>, diakses 16 Juni 2011.

A.3. Sistem Politik dan Pemerintahan Serbia

Seiring dengan langkah-langkah formal menuju keanggotaan Uni Eropa, proses reformasi internal dan pembentukan konsensus sedang berlangsung di Serbia. Dengan maksud untuk mencapai konsensus nasional mengenai akses ke Uni Eropa, Pemerintah Serbia membentuk Dewan Integrasi Eropa pada tahun 2002, sebagai sebuah badan penasihat yang mewakili semua segmen masyarakat Serbia.¹⁶

Pada bulan Oktober 2004, Majelis Nasional mengadopsi Resolusi di Republik Serbia bergabung dengan Uni Eropa. Resolusi tersebut menekankan pada orientasi strategis Serbia untuk mencapai keanggotaan Uni Eropa. Pada bulan Juni 2005, Pemerintah Serbia mengadopsi Strategi Nasional Serbia untuk Akses ke Serbia dan Montenegro ke Uni Eropa, sebagai dokumen payung untuk proses integrasi Eropa di negara itu. Strategi ini menetapkan Republik Serbia untuk melaksanakan kegiatan di semua segmen politik masyarakat, dan hukum, agar dipersiapkan pada tahun 2012 untuk melakukan kewajiban yang timbul dari keanggotaan Uni

¹⁶ "MEMORANDUM, Pemerintah Republik Serbia dalam kaitannya dengan Penerapan Republik Serbia untuk keanggotaan Uni Eropa", dalam <http://www.media.srbija.gov.rs>, diakses 15 Mei 2011.

Eropa. Dari tahun 2004, Republik Serbia telah mempersiapkan rencana aksi tahunan untuk pelaksanaan perjanjian Kemitraan Eropa. Maju ke arah komitmen kesepakatan berbasis, pada tahun 2004 Republik Serbia mulai proses harmonisasi legislasi nasional dengan hukum Uni Eropa, dan mulai mengadopsi rencana Aksi tahunan untuk harmonisasi.

Serbia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Mayoritas partai politik adalah Partai Demokratik, Partai Progresif Serbia, Partai Radikal Serbia, Partai Sosialis Serbia, Partai Demokrat Serbia, Partai Demokrat Liberal, New Serbia, Sosial Demokrat, Partai Aksi Demokratik, Partai Roma, dan Uni Roma Serbia. Parlemen Republik Serbia adalah Badan Legislatif Nasional Serbia, yang merupakan suatu badan yang terdiri dari 250 wakil rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum untuk jangka waktu empat tahun.

Deputi di Majelis Nasional memilih pemerintah Republik Serbia yang bersama dengan Presiden Republik dan merupakan kewenangan eksekutif negara. Republik Serbia dipimpin oleh seorang Presiden dan sekaligus sebagai Kepala Negara, yaitu Boris Tadic. Presiden Republik

Serbia dipilih untuk masa jabatan 5 tahun melalui pemilihan langsung dan memiliki kekuatan penting dalam konstitusi. Presiden bukan anggota Majelis Nasional atau pemerintah. Republik Serbia sangat aktif di berbagai organisasi internasional.

B. Dinamika Ekonomi Serbia

Pembangunan ekonomi menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah negara di tengah perbatasan globalisasi saat ini. Pembangunan ekonomi yang mapan tentunya sangat penting bagi Serbia di tengah pendapatan per kapita masyarakatnya (GDP) hanya mencapai US\$ 2.400 (tahun 2004). Dengan menjadi anggota Uni Eropa, Serbia tentunya akan mengambil keuntungan ekonomi di bidang investasi. Pembangunan ekonomi lewat jalur investasi oleh anggota negara-negara Uni Eropa, tentunya sangat diharapkan oleh Serbia.

Di tengah jumlah warga miskin Serbia yang mencapai angka 30%, tentunya investasi negara-negara Uni Eropa akan menjadi alat pendorong bagi kesejahteraan warga negaranya. Aliran dana investasi yang besar dari negara-negara Uni Eropa yang diimbangi dengan penataan

infrastruktur sektor ekonomi di level domestik Serbia, akan membuat Serbia bisa bersanding dengan negara-negara Eropa yang lain, yang memiliki kekuatan ekonomi yang tangguh di level regional Eropa maupun di luar Eropa.

Setelah pecahnya Yugoslavia dan terjadinya perang saudara, negara-negara Balkan masing-masing mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi, begitu pula dengan Serbia. Serbia mengalami krisis ekonomi, sektor keuangan berantakan dan hanya sedikit orang yang menaruh kepercayaan pada sistem perbankan. Banyak BUMN yang berutang dan tidak memiliki tata kelola perusahaan yang memadai. Bank-bank milik negara di Serbia mengalami kebangkrutan yang disebabkan karena adanya krisis ekonomi. Permasalahan ini semakin diperparah dengan adanya hiperinflasi dan pengangguran yang tinggi.

Seiring dengan berjalannya waktu serta berbagai upaya pemerintah untuk memperbaiki perekonomian Serbia, sedikit demi sedikit telah membawa perubahan pada perekonomian Serbia. Perekonomian Serbia mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2005. Pada tahun tersebut, PDB Serbia diperkirakan tumbuh sebesar 6,3% per tahun yang didorong oleh kenaikan kuat dalam perdagangan,

transportasi, jasa keuangan dan konstruksi, serta lebih dari mengimbangi penurunan hasil pertanian.¹⁷

Pada tahun 2006, perekonomian Serbia tetap menguat. Produksi industri tumbuh sebesar 1,3% dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada semester kedua tahun 2006. Tingkat inflasi tetap pada dua digit disepanjang tahun 2005 yaitu sebesar 17,5%. Hal ini didorong oleh permintaan domestik yang kuat, kenaikan biaya administratif, meningkatnya biaya impor bahan bakar dan semakin diperparah oleh tingkat inflasi yang meluas serta pertukaran indeksasi tingkat harga di tahun 2005.

Tahun 2006, tingkat inflasi turun menjadi 11,6% pada bulan September. Pada tahun 2005, pemerintah Serbia memutuskan untuk melakukan pengetatan kebijakan fiskal lebih lanjut untuk menekan biaya subsidi.¹⁸

Namun pada tahun 2008, kondisi perekonomian Serbia kembali mengalami ketidak stabilan akibat adanya krisis keuangan global. Pada bulan Desember 2008 telah terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 10.212 orang

¹⁷ "Profil negara Serbia", dalam <http://www.eubusiness.com/europe/serbia/serbia-country-profile/&usg=ALkJrhgDjN80IBqZ7NDl7XecaHBPfo0VAw>, diakses 16 Maret 2011.

¹⁸ *Ibid.*

dibandingkan bulan Oktober 2008 dan total jumlah pengangguran pada akhir tahun adalah 727,621 orang.¹⁹ Hal ini disebabkan karena terjadinya krisis keuangan global yang melanda beberapa negara diantaranya AS disusul oleh Islandia, Irlandia dan Inggris serta disusul oleh daratan Eropa, dalam hal ini yaitu Serbia.

Akibat dari krisis keuangan tersebut, pada kuartal keempat tahun 2008 perekonomian di Serbia mengalami keterpurukan yang ditandai dengan adanya kenaikan harga secara drastis pada sektor sarana dan prasarana layanan umum sejak tanggal 1 Januari 2009, jatuhnya pasar bursa, pengambilan sebagian tabungan masyarakat dan depresiasi mata uang dinar walaupun Bank Nasional Serbia melakukan kebijakan intervensi pada pasar mata uang.

Pada saat yang sama posisi eksternal Serbia mengalami ketidakseimbangan yang semakin tinggi. Defisit neraca diperkirakan mencapai 18% dari total PDB, walaupun sejauh ini dapat dibiayai oleh masuknya modal yang mendorong naiknya cadangan devisa Serbia. Kesemua perkembangan tersebut mendorong meningkatnya resiko stabilitas

¹⁹ "Serbia, Peluang Ekonomi di luar Negeri", dalam <http://www.deplu.go.id/belgrade/Pages/TipsOrIndonesiaGlanceDisplay.aspx?IDP=2&IDP2=2&l=id>, diakses 25 Mei 2011.

eksternal yang dicerminkan dari tingginya defisit eksternal, tingginya hutang sektor swasta, tingginya Euronisasi dan rendahnya indikasi daya saing ekspor. Resiko stabilitas keuangan juga meningkat namun likuiditas sektor perbankan dan cadangan modal cukup menjanjikan. Namun demikian, pemerintah Serbia terus berupaya untuk memperbaiki perekonomian negaranya tersebut.

Selama tiga tahun menghadapi krisis ekonomi global, Serbia melakukan upaya yang terbaik untuk mempertahankan defisit fiskal pada tingkat 4% dari total PDB, dimana upaya tersebut didorong adanya bantuan besar dari perjanjian antara Serbia dengan IMF. Selama empat bulan terakhir, Serbia menarik pinjaman dari Bank Investasi Eropa sebesar 250 juta euro dan berencana akan menarik pinjaman lagi dalam jumlah yang sama pada musim panas tahun ini, dimana dana tersebut akan dipakai untuk eksportir dan media.

Pemerintah Serbia berharap dengan adanya bantuan keuangan dari Bank Investasi Eropa tersebut dapat mengurangi defisit fiskal pada tingkat 3% dari total PDB di tahun 2013 dan lebih jauh lagi pada tingkat 1% dari

total PDB di tahun 2015. Pemerintah Serbia juga berharap utang publik dapat berkurang sampai 40% dari total PDB, di tahun 2015.²⁰

Serbia memiliki sejarah panjang perdagangan internasional, bahkan di bawah komunisme, dan dapat menarik kehadiran perusahaan asing yang cukup besar. Hal ini dapat terlihat dari adanya keterbukaan terhadap Investasi Asing. Dimana, pemerintah Serbia bekerjasama dan memiliki 41 perjanjian perlindungan investasi bilateral dengan negara-negara berikut: Albania, Austria, Belarus, Belgia dan Luxemburg, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Rusia, Cina, Siprus, Kroasia, Kuba, Republik Ceko, Mesir, Finlandia, FYR Makedonia, Prancis, Jerman, Ghana, Yunani, Guinea, Hungaria, Belanda, India, Iran, Israel, Italia, Kuwait, Libya, Lithuania, Maroko, Nigeria, Polandia, Rumania, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Inggris, Ukraina, Zimbabwe.²¹

²⁰ "Serbia to issue Eurobonds as of September", dalam <http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=77252>, diakses 19 Juni 2011.

²¹ "Serbia Iklim Investasi 2009", dalam <http://www.eubusiness.com/europe/serbia/invest/&usg=ALkJrhiNlrHs5NYH1iMDFyMF6mM3yLVSuQ>, diakses 28 Mei 2011.

Selain itu, pada tanggal 17 Desember 2009, pemerintah Serbia telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) di Jenewa, yang mencakup blok perdagangan Islandia, Lichtenstein, Norwegia dan Swiss. Perjanjian tersebut ditandatangani pada Konferensi Tingkat Menteri EFTA, dimana Serbia diwakili oleh Mladjan Dinkic selaku Menteri Serbia. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi oleh Parlemen Serbia pada April 2010. Penandatanganan Perjanjian Perdagangan tersebut merupakan satu langkah penting untuk memperbaiki perekonomian Serbia. Perjanjian tersebut memberikan kemungkinan bebas bea ekspor bagi produk-produk Serbia di pasar EFTA dan meningkatkan arus investasi ke Serbia.²²

Untuk melindungi perekonomian dalam negerinya, pemerintah Serbia mengambil beberapa kebijakan di antaranya yaitu pemerintah Serbia membuat undang-undang

²² "Signed Free Trade Agreement with EFTA Members", dalam <http://www.siepa.gov.rs/site/en/home/2/news/index.php?nid=204>, diakses 28 Mei 2011.

khusus yang menguraikan adanya jaminan dan perlindungan bagi investor asing yaitu undang-undang Penanaman Modal Asing. Dimana undang-undang tersebut berisi tentang penghilangan pembatasan investasi sebelumnya; meluaskan perlakuan nasional kepada investor asing, memungkinkan transfer/repatriasi keuntungan dan dividen; memberikan jaminan terhadap pengambilalihan, dan memungkinkan keringanan bea cukai untuk peralatan yang diimpor sebagai modal. Serbia Investasi dan Promosi Ekspor Nasional (SIEPA) memberikan bantuan langsung kepada investor. Selain itu, Badan Privatisasi menyediakan informasi dan bekerjasama dengan investor yang potensial untuk mendidik mereka tentang program privatisasi dan peluang yang terkait.

Namun tidak ada kasus pengambilalihan investasi asing di Serbia. Hal tersebut dijamin oleh undang-undang Penanaman Modal Asing. Dalam rangka untuk menarik FDI tahun 2006, Serbia mengembangkan berbagai insentif bagi para investor di tahun 2006, yaitu dengan cara memberikan bantuan keuangan kepada investor asing yang menciptakan lapangan kerja baru yang signifikan serta insentif pajak dalam bentuk kredit, pemotongan kontribusi penggajian dan

mengurangi tingkat pajak perusahaan. Kemudian program ini di perluas oleh Pemerintah Serbia, pada bulan Juli 2008.

Disisi lain, pada bulan Mei 2006, Serbia diundangkan untuk pengujian pertama undang-undang tentang Arbitrase yang memungkinkan penggunaan arbitrase institusional dan ad hoc di semua jenis perselisihan (komersial, tenaga kerja, dan lain-lain). Hukum ini didasarkan pada model hukum Komisi PBB untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNICTRAL). Internasional arbitrase diterima sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa investasi antara investor asing dan negara. Pengadilan Arbitrase Perdagangan Luar Negeri (didirikan pada 1947) ini terletak di Kamar Dagang Serbia dan merupakan badan arbitrase domestik. Arbitrase ini bersifat sukarela dan sesuai dengan model hukum UNICTRAL.

Selain itu, pada tanggal 15 Juni 2011 kemarin, pemerintah Serbia menandatangani Protokol amandemen Perjanjian Perdagangan Bebas antara Serbia dengan Belarus di Minsk, yang diwakili oleh Nebojsa Ciric selaku Menteri Ekonomi dan Pembangunan Daerah Serbia. Protokol tersebut merupakan harmonisasi atau kerjasama antara Serbia dengan

Uni Bea Cukai dari Rusia, Belarus dan Kazakhstan dalam bidang perdagangan.

Kementerian Ekonomi dan Pembangunan menyatakan bahwa perjanjian tersebut memungkinkan memberi peningkatan bagi daya saing ekonomi dan ekspor Serbia serta meningkatkan keuntungan perdagangan bersama dengan negara-negara anggota Uni Bea Cukai.²³

Untuk kedepannya, prospek kerjasama antara Serbia dengan Belarus akan bergerak dalam bidang pertanian, pengolahan logam, kimia dan industri farmasi, barang-barang metal dan non metal, produksi barang-barang konsumsi dan bahan bangunan, serta investasi dan pariwisata daerah.

Dalam empat bulan pertama tahun ini, total perdagangan dengan Belarus mencapai US\$ 48.300.000, dimana dengan total nilai ekspor sebesar US\$ 13.800.000 (meningkat 66,6%) dan total nilai impor sebesar US\$ 34.500.000 (meningkat 8,9%).²⁴ Di tahun sebelumnya, pada

²³ "Serbia-Belarus to sign amendments to Free Trade Agreement", dalam <http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=77110>, diakses 19 Juni 2011.

²⁴ *Ibid.*

tanggal 7 Oktober, Serbia telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Kazakhstan.

C. Perluasan Keanggotaan Uni Eropa dan Kondisi (syarat) untuk menjadi anggota Uni Eropa

C.1. Perluasan Uni Eropa

Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang bertaraf supranasional karena anggotanya berasal dari negara-negara Eropa, yang memberi jaminan perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara anggotanya. Cita-cita untuk membentuk Eropa bersatu telah ada sejak lama, namun upaya tersebut baru terwujud setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kehancuran Eropa akibat Perang Dunia II, telah memberikan motivasi yang kuat di antara negara-negara Eropa untuk membangun hubungan multilateral dalam kerangka integrasi yang bertujuan mencapai kemakmuran, perdamaian dan stabilitas Eropa. Pada awalnya, Uni Eropa memfokuskan kerjasama di bidang ekonomi saja. Namun dalam perkembangannya Uni Eropa bergerak meluas ke segala bidang kehidupan negara.

Uni Eropa merupakan organisasi regional yang mempunyai cita-cita untuk menyatukan kembali benua Eropa

ke dalam satu kesatuan. Pada saat ini Uni Eropa merupakan organisasi yang memiliki tingkat integrasi yang paling tinggi karena anggotanya berasal dari hampir seluruh negara di benua Eropa. Selain itu, Uni Eropa telah terbukti merupakan organisasi yang kokoh dengan adanya perluasan Uni Eropa itu sendiri. Keberadaan Uni Eropa yang muncul menjadi aktor penting di kawasan Eropa, telah meyakinkan Serbia untuk mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa.

Pada pertengahan tahun 1950, Jean Monnet telah mengemukakan pendapatnya tentang perlunya suatu wadah kepentingan di antara negara-negara dalam bentuk pasar yang dikelola bersama di bawah badan pengawasan yang berwenang dan independen. Ide tersebut pun kemudian disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Perancis Robert Schumann dan kanselir Jerman Konrad Adenauer. Dan pada tanggal 9 Mei 1950, usulan tersebut pun secara resmi dikemukakan Perancis dan disambut baik oleh Jerman, Italia, Belanda, Belgia dan Luxemburg.²⁵

²⁵ Philip Thody, *An Historical Introduction to the European Union*, Routledge : London, New York, 1997, hal 2-3.

Setahun kemudian proses integrasi Eropa pun dimulai, dimana keenam negara tersebut menandatangani *Treaty of Paris* yang menandai dimulainya proses integrasi Eropa dengan dibentuknya "Komunitas Batu bara dan Baja Eropa" (European Coal and Steel Community / ECSC). Traktat tersebut ditandatangani di Paris tanggal 18 April 1951 dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Tujuan utama dari ECSC adalah menghapus berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan suatu pasar bersama dimana produk/barang, pekerja dan modal yang berasal dari sektor batu bara dan baja dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas.

Pada tanggal 1-2 Juni 1955, diselenggarakan konferensi yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri dari 6 negara penandatangan ECSC di Messina, Italia. Konferensi tersebut menghasilkan resolusi untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi, melalui pembentukan institusi dan pasar bersama. Penyatuan ekonomi nasional secara bertahap serta harmonisasi gradual dalam hal kebijakan sosial.

Dan pada tanggal 25 Maret 1957, penandatanganan *Treaty of Rome* pun terjadi di Roma. Perjanjian tersebut

menjelaskan perluasan integrasi Eropa ke semua bidang ekonomi dengan membentuk *European Atomic Energy Community* namun lebih dikenal dengan *Euratom* dan *European Economic Community* (EEC), yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 1958. Tujuan utama *Treaty of Rome* (EEC) adalah penciptaan suatu pasar bersama di antara negara-negara anggotanya melalui:²⁶

- Pencapaian suatu Custom Unions yang di satu sisi melibatkan penghapusan customs duties, import quotas dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota, serta di sisi lain memberlakukan suatu *Common Customs Tariff* (CCT) bagi negara ketiga (non anggota).
- Implementasi melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota dengan *Four Freedom of Movement* (barang, jasa, pekerja dan modal).

Ketiga komunitas tersebut masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda. Namun sejak 1 Juli 1967, dibentuk satu Dewan dan satu Komisi untuk lebih memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas.

²⁶ "Sejarah Pembentukan Uni Eropa (UE)", dalam <http://www.indonesianmission.eu.org>, diakses 24 Januari 2011.

Dimana dalam hal ini Komisi Eropa mewarisi wewenang ECSC *High Authority*, EEC *Commission* dan *Euratom Commission*. Sejak saat itu ketiga komunitas tersebut dikenal sebagai *European Communities* (EC).

Pelaksanaan *Treaty of Rome* membuahkan hasil yang terlihat dari keberhasilan EEC meningkatkan perdagangan lintas batas negara. Keberhasilan yang dicapai EEC tersebut mendorong Denmark, Irlandia dan Inggris untuk menjadi anggota (1 Januari 1973) yang menandai perluasan keanggotaan *European Community*. Tahun 1981 *European Community* kembali memperluas keanggotaannya dengan masuknya Yunani dan disusul kemudian dengan Spanyol dan Portugal pada tahun 1986. sebelumnya, pada 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luxemburg dan Perancis menandatangani *Schengen Agreement*, dimana mereka sepakat untuk secara bertahap menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan manusia secara bebas baik warga negara sendiri maupun warga negara lain.²⁷

²⁷ *Ibid.*

Beberapa bulan kemudian, tepatnya bulan Desember 1985, Dewan Eropa kembali mengadakan sidang di Luxemburg untuk mengamandemen *Treaty of Rome* dan memperkuat kembali proses integrasi Eropa dengan menyusun Perjanjian Tunggal Eropa (*Single European Act / SEA*). *Single European Act* ditandatangani pada bulan Februari 1986 dan mulai berlaku tanggal 1 Juli 1987 yang ditujukan sebagai suplemen EEC. Tujuan utama *Single Act* adalah pencapaian pasar internal. Perjanjian ini mencetuskan terciptanya Pasar Tunggal pada tahun 1993 yang berarti adanya kebebasan bergerak bagi orang, barang, jasa dan modal dalam lingkungan wilayah masyarakat Eropa.

Tahap selanjutnya adalah penandatanganan *Treaty of Maastricht (Treaty on European Union)*. Perjanjian ini ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7 Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, dimana perjanjian ini telah mengubah *European Communities (EC)* menjadi *European Union (EU)*. Perjanjian ini menandai integrasi Uni Eropa meluas hingga pada penyatuan masalah sosial, politik dan hukum. Hal ini juga membuktikan keanggotaan Uni Eropa meluas menjadi 15 negara dengan

bergabungnya Austria, Finlandia dan Swedia pada tahun 1995.²⁸

Treaty of Maastricht merupakan ratifikasi dari perjanjian-perjanjian sebelumnya (ECSC, Euratom, dan EEC), sekaligus menciptakan tiga pilar Uni Eropa, yaitu ;²⁹

1. Masyarakat Eropa (*European Community*), yakni menyepakati pelaksanaan agenda integrasi ekonomi yaitu pembentukan Pasar Tunggal Eropa dan Penyatuan Ekonomi dan Moneter.
2. Kebijakan bersama dalam urusan luar negeri dan keamanan (*Common Foreign and Security Policy / CFSP*), merupakan kerjasama intergovernmental berupa forum diskusi kebijakan luar negeri serta deklarasi dan tindakan bersama dalam urusan luar negeri dan keamanan.
3. Kerjasama dibidang peradilan dan urusan dalam negeri (*Justice and Home Affairs / JHA*), merupakan kerjasama intergovernmental yang diformulasikan untuk mengatasi

²⁸ "The Enlargement of The European Union", dalam http://www.auswaetirges_amt.de, diakses 6 Juni 2010.

²⁹ *Ibid.*

permasalahan-permasalahan dalam negeri di antaranya masalah kriminalitas, peredaran narkoba, imigrasi dan hak-hak perlindungan.

Dalam perjanjian ini menyimpulkan juga keputusan mengenai penyatuan ekonomi dan moneter (*European Monetary Unit / EMU*) dengan satu mata uang tunggal yaitu Euro pada tahun 1999. Kini Uni Eropa bukan semata-mata organisasi yang mengejar kepentingan nasional anggotanya, tapi lebih dari itu Uni Eropa telah memiliki identitas korporat, yaitu sebuah organisasi internasional bagi seluruh bangsa Eropa yang berazaskan nilai liberal, penghormatan terhadap HAM dan Demokrasi. Pada tanggal 17 Juni 1997, Dewan Eropa mengadakan pertemuan kembali guna merevisi *Treaty of Maastricht* dan menghasilkan sebuah perjanjian baru yaitu *Treaty of Amsterdam*.

Treaty of Amsterdam ditandatangani pada tanggal 17 Juni 1997, di Amsterdam. Perjanjian ini telah membuka kesempatan bagi negara-negara Eropa untuk mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa. Keanggotaan Uni Eropa terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota Uni Eropa. Oleh sebab itu, negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur menjadikan ini sebagai suatu

kesempatan untuk bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. Sebelum penandatanganan *The Treaty of Amsterdam*, negara-negara Eropa telah memulai usahanya untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa, dengan mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa.

Untuk menjadi anggota Uni Eropa, setiap negara sebelumnya harus membuat perjanjian Asosiasi atau yang juga dikenal sebagai Perjanjian Eropa (*European Agreements*), tujuannya untuk memberikan kerangka kerja yang sesuai bagi negara-negara itu untuk secara bertahap berintegrasi ke dalam Uni Eropa. Selain persyaratan itu, negara-negara calon anggota tersebut juga harus memenuhi kriteria Kopenhagen yang dirumuskan oleh Dewan Eropa bulan Juni 1993.

Kemudian tahun 2000 *The Treaty of Nice* ditandatangani oleh Dewan Eropa. Perjanjian ini dibentuk dalam Pertemuan European Council tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice. Namun perjanjian ini baru mulai berlaku tanggal 1 Februari 2003. Hasil dari perjanjian ini adalah: dibatasinya jumlah anggota Parlemen maksimal sebanyak 732 orang dan sekaligus memberi alokasi jumlah kursi tiap negara anggota (sudah termasuk negara anggota baru); dirubahnya

mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam *Treaty on European Union* yang sebelumnya menggunakan kebulatan suara dan diganti dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara mayoritas (*qualified majority voting*); dirubahnya bobot suara negara-negara anggota Uni Eropa mulai 1 Januari 2005 (sudah termasuk negara-negara anggota baru); dibatasinya jumlah Komisioner, 1 Komisioner tiap 1 negara Mulai 2005, dan batas maksimum jumlah Komisioner akan ditetapkan setelah Uni Eropa beranggotakan 27 negara, serta memperkuat posisi Presiden Komisi; serta memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa, yang digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan *Intergovernmental Conference* di tahun 2003.

Tahap terakhirnya adalah Konvensi Masa Depan Eropa dan Traktat Akses 10 Negara Anggota Baru. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 16 April 2003 dan berlaku mulai tanggal 1 Mei 2004. Adapun hasil dari pembahasan perjanjian tersebut, yaitu :

- Penyederhanaan traktat-traktat Uni Eropa kedalam satu Traktat, dengan penyajian yang lebih jelas dan lebih mudah dimengerti.

- Demarkasi kewenangan (wewenang Uni Eropa, wewenang negara anggota, dan lain-lain).
- Peran Parlemen negara-negara anggota dalam struktur Uni Eropa.
- Status *Charter of Fundamental Rights* yang diproklamirkan di Nice.

Selama ini proses integrasi dalam pembentukan Uni Eropa diraih melalui tiga strategi utama yaitu: *deepening*, *completion*, dan *enlargement*.³⁰ Strategi *deepening* adalah strategi pendalaman yang berisi tentang pemberian tugas, wewenang, peran dan tanggung jawab yang lebih besar kepada institusi-institusi dalam Uni Eropa. Salah satu pencapaian dari strategi *deepening* yaitu penguatan dan penyederhanaan di tingkat birokrasi Uni Eropa (dewan menteri, parlemen, dan komisi), melalui mekanisme pengambilan keputusan mayoritas karena sebelumnya pengambilan keputusan ini diatur dengan syarat *unanimous* (suara bulat).

Strategi *Completion* adalah strategi penyelesaian program yang diagendakan oleh program integrasi, salah

³⁰ "The Benefits of Enlargement, European Union", dalam www.europa.eu.int/enlargement, diakses 2 Januari 2011.

satunya adalah program penyatuan mata uang Eropa yang mulai berlaku pada tahun 1999.

Sedangkan strategi *Enlargement* adalah strategi perluasan dengan memberikan kesempatan kepada negara-negara Eropa untuk bergabung dalam Uni Eropa dengan memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Perluasan merupakan proyek ambisius Uni Eropa untuk mewujudkan *United European*. Perluasan tidak hanya menambah jumlah keanggotaan tetapi juga memberikan keuntungan bagi negara-negara anggotanya baik secara politik maupun ekonomi.³¹

Dari segi politik, perluasan terbukti mampu memperkuat keamanan, stabilitas dan perdamaian di Eropa. Sedangkan dari segi ekonomi, perluasan mampu meningkatkan kesejahteraan, mendorong pertumbuhan serta menciptakan investasi baru.

Sejak awal pembentukannya, Uni Eropa telah mengalami perluasan keanggotaan sebanyak tujuh kali. Awal tahun 1990-an karena adanya tekanan dari negara-negara Eropa Tengah dan Timur serta beberapa negara anggota masyarakat Eropa terutama Jerman, Inggris dan Denmark untuk

³¹ *Ibid*

mendekatkan hubungan politik dan ekonomi, mendorong komisi Eropa untuk melakukan pendekatan baru terhadap negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Pada bulan Agustus 1990, komisi Eropa mengajukan proposal bagi Perjanjian Asosiasi (*Europe Agreement*) dengan negara-negara tersebut.

Negosiasi awal dilakukan dengan Polandia, Hungaria dan Cekoslovakia. Perjanjian yang sama juga dilakukan dengan negara-negara Eropa Tengah dan Eropa Timur lainnya. *Europe Agreement* merupakan dasar hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara calon anggota menuju perdagangan bebas, peningkatan bantuan ekonomi dan finansial.

Setelah adanya perjanjian Maastricht, kebijakan terhadap negara-negara Eropa Tengah dan Timur mulai berubah. Dewan Eropa pada bulan Juli 1992 menyetujui laporan Komisi Eropa mengenai prospek "*European Union of 20*" dan memulai kerjasama dengan negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Pada KTT di Edinburg bulan Desember 1992, para kepala negara dan kepala pemerintahan mendeklarasikan jadwal persiapan perluasan. Pada bulan Juni 1993 dalam pertemuan di Kopenhagen, Dewan Eropa

menyetujui bahwa negara-negara Eropa Tengah dan Timur dapat menjadi anggota setelah memenuhi kriteria yang telah dirumuskan dalam pertemuan tersebut atau yang lebih dikenal dengan kriteria Kopenhagen.

Pada tahun 1994, Dewan Eropa Corfu menyiapkan strategi persiapan perluasan negara-negara Eropa Tengah dan Timur. Upaya ini didukung oleh pemerintah Jerman dan pada bulan Desember 1994, Dewan Eropa Essen menyetujui strategi pra perluasan tersebut. Strategi ini berupa "multilateral structured relationship" yang merupakan pertemuan reguler antara Uni Eropa dan negara-negara Eropa Tengah dan Timur pada level yang berbeda, dari kepala negara ataupun kepala pemerintahan hingga tingkat di bawahnya serta seperangkat aturan untuk menyelaraskan ekonomi dan sistem hukum mereka sesuai dengan aturan pasar internal dan pemberian bantuan finansial.

Pada KTT di Madrid bulan Desember 1995, Dewan Eropa menyetujui untuk memulai negosiasi perluasan dengan negara-negara calon anggota setelah konferensi *Intergovernmental* yang dilaksanakan pada bulan Maret 1996 dan berjanji akan memperlakukan semua negara calon anggota dengan sama. *Treaty of Amsterdam* pada 17 Juni

1997 telah membuka kesempatan bagi negara-negara Eropa untuk mengajukan aplikasi permohonan keanggotaan Uni Eropa. Pada Juli 1997, sesuai kesiapan masing-masing negara calon anggota dalam memenuhi kriteria Kopenhagen, Komisi Eropa menyimpulkan bahwa negosiasi perluasan gelombang pertama dilaksanakan dengan diterimanya lima negara anggota baru dari Eropa Tengah dan Timur yaitu Polandia, Hungaria, Republik Ceko, Estonia, Slovakia, dan Siprus pada 1 Mei 2004. Pada pertemuan Luxembourg 1997, Dewan Eropa memutuskan untuk memulai negosiasi perluasan sesuai dengan laporan dan rekomendasi dari Komisi Eropa. Pertemuan Luxembourg menghasilkan keputusan historis dalam perluasan, yaitu keputusan untuk memulai proses perluasan akhir Maret 1998 melalui pertemuan dengan Menlu ke-15 negara anggota Uni Eropa dan 10 negara Eropa Tengah dan Timur serta Siprus. Pada pertemuan ini juga membahas mengenai Turki (bulan April 1987) dan memutuskan bahwa Turki tidak dapat melanjutkan proses perluasan karena belum memenuhi syarat keanggotaan.

KTT Uni Eropa di Kopenhagen pada tanggal 12-13 Desember 2002, memutuskan untuk menerima keanggotaan 10 negara pemohon, dimana proses negosiasi keanggotaan Uni

Eropa dengan ke-10 negara kandidat telah selesai pada 13 Desember 2002. Untuk lebih mengetahui seberapa besar dukungan masyarakat terhadap keanggotaan Uni Eropa, diadakan referendum di negara-negara kandidat kecuali Siprus. Sebelum menjadi anggota Uni Eropa, negara-negara kandidat harus menandatangani *Treaty of Accession* ke-6 di Athena pada tanggal 16 April 2003 dan resmi menjadi anggota Uni Eropa pada 1 Mei 2004. Kesepuluh negara tersebut yaitu Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Slovenia, Polandia, Malta, Siprus, Slowakia dan Lithuania. Hal ini menambah keanggotaan Uni Eropa yang pada awal pembentukannya hanya beranggotakan enam negara.

Di akhir tahun 1990-an, Uni Eropa telah mempertimbangkan untuk memperluas kekuasaannya di daerah Balkan. Hal ini semakin jelas terlihat di tahun 2003, ketika Uni Eropa secara resmi menyatakan bahwa negara-negara Balkan merupakan negara-negara kandidat yang potensial untuk masuk dalam keanggotaan Uni Eropa. Namun setelah penerimaan Kroasia dalam keanggotaannya, Uni Eropa memutuskan untuk memberhentikan dulu sementara proses perluasan keanggotaannya. Hal ini dikarenakan penerimaan keanggotaan yang sebelumnya yaitu Rumania dan

Bulgaria yang terlalu cepat dan dianggap dipaksakan, tidak memberikan manfaat bagi Uni Eropa itu sendiri. Oleh sebab itu, negara-negara bekas Yugoslavia (Balkan) harus melakukan terlebih dulu reformasi secara mendalam dan memenuhi sepenuhnya persyaratan keanggotaan, sebelum dapat melangkah lebih jauh ke Uni Eropa.

Perluasan keanggotaan dalam Uni Eropa telah mengalami perluasan keanggotaan sebanyak tujuh kali. Dari awal terbentuknya, sifat organisasi memang terbuka sesuai pasal 8 Akta Tunggal Eropa. Perluasan keanggotaan pertama kali dilakukan ketika Inggris, Denmark dan Irlandia diterima menjadi anggota tahun 1973 dan yang terakhir Bulgaria dan Rumania tahun 2007.

Perluasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan, kohesi dan pengaruh Uni Eropa di dunia internasional. Perluasan juga akan merubah situasi geopolitik Uni Eropa dan menempatkan Uni Eropa dalam posisi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan globalisasi, memperkuat dan mempertahankan *Europe Model*.³² Perluasan akan mengurangi resiko kriminalitas,

³² "The Benefits of Enlargement, European Union", *Loc.Cit.*

perdagangan narkoba dan imigrasi ilegal serta akan memperkuat peran Uni Eropa dalam pergaulan internasional, dalam kebijakan luar negeri dan keamanan, kebijakan perdagangan dan bidang-bidang global lainnya.

C.2. Kriteria Kopenhagen

Uni Eropa merupakan organisasi internasional yang bertaraf supranasional karena anggotanya berasal dari negara-negara Eropa, yang memberi jaminan perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara anggotanya. Badan supranasional berarti bahwa badan ini memiliki kekuasaan dan otoritas berdasarkan kepentingan komunitas yang melebihi batas-batas kedaulatan nasional. Perjanjian Maastricht telah menggerakkan integrasi Eropa ke arah pembentukan badan yang bersatu.

Organisasi seperti Uni Eropa, dituntut untuk dapat mengartikulasikan nilai dan norma masyarakat internasional dalam deskripsi organisasi serta mampu mendefinisikan karakteristik anggotanya dan tujuannya terhadap negara anggota. Selain itu, Uni Eropa juga dituntut untuk mengatur tingkah laku anggotanya, sekaligus membentuk identitas dan kepentingan anggotanya.

Tiga hal mengenai kedaulatan negara yaitu: mata uang, keamanan internal dan keamanan eksternal yang akan ditransfer kepada level supranasional.

Pada dasarnya masyarakat Eropa menyangkutkan diri pada nilai dan norma liberal. Pada taraf domestik pelaksanaan nilai ini terwujud dalam tatanan masyarakat yang plural, pemerintah yang berdasarkan hukum, demokrasi perwakilan, kepemilikan pribadi dan kompetisi terbuka yang bersumber pada penghormatan terhadap hak asasi liberal. Sedangkan pada taraf internasional, nilai-nilai liberal terwujud dalam manajemen konflik secara damai dan kerjasama multilateral. Nilai liberal ini di dasarkan untuk membangun identitas Eropa, yang tercermin dalam arah integrasi dan persyaratan bagi negara yang ingin menjadi anggota Uni Eropa.

Keanggotaan Uni Eropa terbentuk dan terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi, sesuai dengan traktat Uni Eropa. *Pertama*, kriteria geografis yang dirumuskan dalam *Treaty Maastricht*, 1992. *Kedua*, kriteria politik, ekonomi dan legislatif yang dirumuskan dalam *Copenhagen Criteria*, Denmark, 1993. Hal ini pula yang membuat negara-

negara di Eropa Timur dan Eropa Tengah serta negara-negara di kawasan Balkan berminat untuk bergabung dengan Uni Eropa. Runtuhnya komunisme menggusur batas-batas ideologis dan negara-negara baru di Eropa Timur, Eropa Tengah dan negara-negara Balkan. Negara-negara baru tersebut mulai menyadari bahwa keanggotaan dalam masyarakat Eropa merupakan kunci utama untuk bergabung kembali dan bekerjasama dengan Eropa dan identitas ke-Eropaan masing-masing negara kandidat dinilai dari dua persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, serta negara tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakkan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konstitusinya.

Persyaratan tersebut lebih dikenal sebagai kriteria Kopenhagen yang dirumuskan oleh Dewan Eropa pada bulan Juli 1993. Pelaksanaan atas KTT Kopenhagen mengukana strategi pertemuan regular antara Uni Eropa dengan negara-negara Eropa Timur dan Eropa Tengah. Pertemuan tersebut dilakukan pada level yang berbeda-beda dengan menggunakan seperangkat aturan untuk menelaraskan ekonomi dan sistem hukum mereka, sesuai aturan pasar

internasional dan pemberian bantuan finansial. Adapun isi dari kriteria Kopenhagen tersebut yaitu:³³

4. Stabilitas dari lembaga-lembaga yang menjamin demokrasi, penegakan hukum, hak asasi manusia serta rasa hormat dan perlindungan terhadap golongan minoritas (kriteria politik).
5. Adanya ekonomi pasar yang berjalan maupun kemampuan untuk mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan-kekuatan pasar dalam wilayah Uni Eropa (kriteria ekonomi).
6. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota yaitu mampu memenuhi tujuan dari penyatuan politik, ekonomi dan moneter (kriteria mengenai pengadopsian perundang-undangan masyarakat Eropa).

Dengan adanya kriteria yang telah diberikan oleh Uni Eropa, membuat negara-negara kandidat harus dapat memenuhi kriteria tersebut agar dapat menjadi anggota Uni Eropa secara penuh. Dengan memenuhi persyaratan, berarti negara tersebut telah memiliki identitas Eropa.

³³ "European Union Enlargement - A Historic Opportunity", dalam <http://europa.eu.int/comm/enlargement/intro/criteria.htm>, diakses 7 November 2010.

C.2.1. Kriteria Kopenhagen Dalam Bidang Politik

Setiap negara calon anggota yang telah mengajukan permohonan keanggotaan ke Uni Eropa, harus dapat memenuhi beberapa kriteria yang diajukan oleh Uni Eropa. Kriteria tersebut lebih dikenal dengan kriteria Kopenhagen. Tujuan dibentuknya *Copenhagen Criteria* adalah untuk mengurangi kemungkinan permainan kepentingan dalam penerimaan calon anggota baru, sebab kepentingan politik dapat mengganggu proses *governance* dalam Uni Eropa.

Kriteria Kopenhagen terbagi menjadi tiga bagian yaitu, kriteria dalam bidang politik, ekonomi dan pengadopsian undang-undang (yudikatif). Secara garis besar, Kriteria Kopenhagen dalam bidang politik mencakup tentang : (1) negara calon anggota harus mampu memenuhi stabilitas institusi yang menjamin demokrasi dan penegakan hukum, melalui pengaplikasian sistem pemerintahan demokratis dan pengaplikasian konsep *the rule of law*. Yang berarti tidak ada individu yang kebal hukum. Semua orang memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, dapat diatur oleh atau dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku. Dalam hal ini, pemerintahan yang demokratis yaitu pemerintahan yang meliputi adanya

partisipasi publik, kesetaraan/persamaan hak, pemilu yang demokratis, liberalisme politik (mendirikan partai politik), pers bebas, dan kebebasan berpendapat/berorganisasi; (2) negara calon anggota harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM); (3) negara calon anggota harus mampu untuk menjamin perlindungan dan kesamaan hak bagi kaum minoritas; (5) negara calon anggota harus mendapat persetujuan dari negara anggota lain, terkait dengan prediksi bahwa calon negara anggota dapat menyesuaikan diri dengan institusi Uni Eropa serta mampu terintegrasi secara penuh baik dalam bidang ekonomi maupun politik.³⁴

C.2.2. Kriteria Kopenhagen Dalam Bidang Ekonomi

Selain kriteria dalam bidang politik, negara calon anggota juga harus mampu memenuhi kriteria Kopenhagen lainnya yaitu kriteria dalam bidang ekonomi. Secara garis besar, Kriteria Kopenhagen dalam bidang ekonomi mencakup tentang : (1) Adanya ekonomi pasar yang berjalan maupun

³⁴ "Masalah Perluasan Keanggotaan: Politisasi Konstitusi Eropa", dalam <http://politik.kompasiana.com/2010/06/19/masalah-perluasan-keanggotaan-politisasi-konstitusi-eropa/>, diakses 25 Juli 2011.

kemampuan untuk mengatasi tekanan persaingan dan kekuatan-kekuatan pasar dalam wilayah Uni Eropa. Dalam hal ini, berarti negara anggota harus memiliki ekonomi yang terbuka serta pasar yang kompetitif. Terkait dengan tingginya tekanan oleh pasar dari dalam dan luar Uni Eropa; (2) Defisit pemerintahan negara anggota tidak boleh melampaui 3% dari GDP. Jika melampaui, harus dilakukan penurunan secara substansial dan terus-menerus hingga mencapai 3%; (3) Utang pemerintah negara anggota tidak boleh melampaui 60% dari GDP. Jika tidak, rasio utang harus diturunkan secara signifikan hingga bergerak ke level 60%; (4) Negara anggota harus mencapai stabilitas rata-rata nilai tukar dalam negerinya sedikitnya selama dua tahun menurut aturan yang ditetapkan oleh mekanisme rata-rata nilai tukar Eropa yang menunjukkan level fluktuasi yang diperbolehkan; (5) Rata-rata nominal suku bunga jangka panjang yang diajukan oleh negara-negara pengaju (*applicant states*) tidak boleh melebihi 2% rata-rata tingkat suku bunga;³⁵

³⁵ "Masalah Perluasan Keanggotaan: Politisasi Konstitusi Eropa", *Loc. cit.*

C. 2.3 Kriteria Kopenhagen Dalam Bidang Pengadopsian Undang-undang (yudikatif)

Selain kriteria dalam bidang politik dan ekonomi, negara calon anggota juga harus mampu memenuhi kriteria Kopenhagen lainnya yang terakhir yaitu kriteria dalam bidang pengadopsian Undang-undang (yudikatif). Secara garis besar, Kriteria Kopenhagen dalam bidang pengadopsian undang-undang (yudikatif) mencakup tentang : Kemampuan negara anggota untuk memenuhi kewajiban sebagai anggota yaitu mampu memenuhi tujuan dari penyatuan politik, ekonomi dan moneter. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah Serbia dalam mengambil dan mengadopsi beberapa Undang-undang, di antaranya yaitu :

- (1) mengadopsi dan melaksanakan undang-undang pada pelatihan awal dan berkelanjutan wajib bagi hakim, jaksa dan staf pengadilan yang mendukung dan memperkuat pusat-pusat pelatihan;
- (2) meratifikasi konvensi internasional melawan korupsi;
- (3) mereview legislasi yang relevan tentang hak beragama, untuk memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan Konstitusi;
- (4) Mengadopsi undang-undang pada asosiasi dan status hukum LSM, mendorong pengembangan organisasi masyarakat sipil dan dialog reguler dengan

masyarakat sipil pada inisiatif kebijakan; (5) mengadopsi secara komprehensif undang-undang anti diskriminasi dan memastikan dukungan kelembagaan yang tepat bagi korban; (6) mengadopsi undang-undang yang memadai tentang restitusi aset dan memastikan pelaksanaan penuh undang-undang tersebut; (6) mengatur undang-undang yang relevan dengan konstitusi baru dan memastikan implementasi penuh hak-hak minoritas; Mengadopsi undang-undang baru bagi pengungsi dan terus menerapkan strategi nasional tentang pengungsi; (7) menyimpulkan dan menerapkan perjanjian dengan negara-negara tetangga pada kerjasama lintas perbatasan, melawan kejahatan perdagangan dan penyelundupan yang terorganisir, kerjasama peradilan, manajemen perbatasan dan lingkungan, dan lain-lain.

BAB III

UPAYA DAN KEBIJAKAN YANG DIAMBIL SERTA HAMBATAN YANG DIHADAPI PEMERINTAH SERBIA DALAM BIDANG EKONOMI UNTUK MENJADI ANGGOTA UNI EROPA

Negara-negara Balkan adalah negara-negara independent dan merupakan negara-negara pecahan Yugoslavia. Setelah Yugoslavia runtuh, negara-negara tersebut membentuk pemerintahan sendiri. Namun negara-negara tersebut membutuhkan waktu dan bantuan karena mereka harus melakukan transisi dari ekonomi dengan sistem komunis menjadi ekonomi dengan sistem pasar.

Oleh sebab itu sebagai negara yang berada di kawasan Eropa, negara-negara Balkan termasuk Serbia memiliki tujuan untuk dapat menjadi bagian dari blok perdagangan Uni Eropa. Dengan bergabungnya mereka ke dalam organisasi tersebut diharapkan pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan. Namun hal ini bukanlah hal yang mudah bagi negara-negara tersebut untuk dapat menjadi bagian dari Uni Eropa.

Terbukti dari sedikitnya jumlah negara di kawasan Balkan yang telah menjadi anggota Uni Eropa beberapa

diantaranya yaitu Slovenia (1 Mei 2004), Rumania dan Bulgaria (1 Januari 2007).³⁶ Sedangkan negara-negara lain masih menunggu untuk dapat menjadi bagian dari organisasi elit tersebut. Hal ini dikarenakan tingkat kesejahteraan di kawasan Balkan sendiri terbilang masih cukup bervariasi.

Selain itu, kondisi politik dan perekonomian di kawasan Balkan yang masih belum stabil pasca pecahnya Yugoslavia dan terjadinya perang saudara diantara negara-negara yang ingin memisahkan diri dari Yugoslavia tersebut. Oleh sebab itu, negara-negara di kawasan Balkan tersebut, termasuk Serbia saling berlomba untuk memperbaiki dan menstabilkan perekonomian negaranya masing-masing dan berusaha untuk mengambil beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi yang sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan Uni Eropa.

³⁶ "Balkan Mesti Lewati Jalan Panjang Untuk Jadi Bagian Uni Eropa", dalam <http://www.vibiznews.com/news/business/2011/04/22/pemulihan-negara-balkan-berpotensi-terhambat-oleh-krisis-yunani/>, diakses 5 April 2011.

A. Upaya dan Kebijakan yang diambil pemerintah Serbia dalam mengatasi hambatan ekonomi

Untuk mempercepat proses integrasinya ke Uni Eropa, pemerintah Serbia terus berupaya untuk memperbaiki perekonomian negaranya tersebut. Selain itu, salah satu syarat untuk menjadi anggota Uni Eropa adalah stabilitas ekonomi negara. Hal inilah yang masih terus diupayakan oleh pemerintah Serbia. Pemerintah Serbia mengambil beberapa kebijakan dalam bidang ekonomi untuk menstabilkan perekonomian negaranya.

Adapun beberapa kebijakan yang diambil pemerintah Serbia untuk mengatasi hambatan dalam bidang ekonomi yaitu Pemerintah Serbia melakukan penekanan pada penjagaan devisa dari sumber dalam negeri terutama melalui penjualan saham NIS, kemungkinan swastanisasi berbagai proyek lain, meminjam dari lembaga keuangan internasional atau meningkatkan pasokan uang melalui pemanfaatan dana IMF, serta pemanfaatan dana yang telah dialokasikan untuk Serbia dari European Investment Bank.³⁷ Selain itu, Bank Dunia telah membantu Serbia

³⁷ "Serbia, peluang ekonomi di luar negeri", dalam <http://www.deplu.go.id/belgrade/Pages/TipsOrIndonesiaGlanceDisplay.aspx?IDP=2&IDP2=2&l=id>, diakses 6 April 2011.

merestrukturisasi sektor perbankan dan privatisasi perusahaan untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta dan penciptaan lapangan kerja.

Disamping itu, upaya pemerintah Serbia untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam negeri pasca terjadinya konflik adalah dengan cara memulihkan kepercayaan perbankan. Pemerintah Serbia melakukan privatisasi bank-bank milik negara yang pailit. Dengan cara menjual bank-bank yang pailit tersebut kepada investor strategis, lokal atau asing. Bank Restrukturisasi Badan (BRA) bertanggung jawab untuk proses privatisasi ini. Tujuan dari proses privatisasi ini adalah untuk menyelesaikan proses pada pertengahan 2007. Sekitar 50% dari total aset perbankan telah dikuasai oleh bank-bank asing. Hal ini membuktikan bahwa kepercayaan investor telah tumbuh kembali dalam sistem perbankan Serbia. Selain itu, Parlemen Serbia baru saja mensahkan Undang-Undang Asuransi Deposito untuk melindungi tabungan masyarakat. BRA akan mulai menerapkan hukum pada tahun 2006.³⁸

³⁸ "Penguatan Ekonomi Serbia", dalam <http://www.worldbank.rs/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ECAEXT/SERBIAEXTN/0,,contentMDK:20577239~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:300904,00.html>, diakses 6 Maret 2011.

Privatisasi perusahaan milik negara pun dilakukan pemerintah Serbia. Dimana dalam hal ini setiap karyawan memiliki hak kepemilikan tertentu dan menjadi prioritas utama. Perusahaan-perusahaan besar cenderung untuk menarik investasi asing dan dijual melalui tender, sedangkan perusahaan-perusahaan kecil diperbolehkan untuk mengatur jadwal mereka sendiri untuk privatisasi. Bank Dunia memberikan bantuan teknis kepada Badan Privatisasi untuk menjual 46 perusahaan melalui tender terbuka, transparan, dan kompetitif. Tujuannya adalah untuk menarik investor asing yang ingin merehabilitasi mereka. Selain itu, Badan Privatisasi juga menyiapkan lelang selama lebih dari 1.100 usaha kecil dan menengah, dengan tujuan menyelesaikan privatisasi pada tahun 2006.³⁹

Pemerintah Serbia juga membentuk kelompok kerja yang mencakup wakil-wakil dari institusi yang paling penting pada sistem keuangan yang saling berhubungan dengan semua faktor-faktor penting pasar Serbia. Selain itu, Pemerintah Serbia mempersiapkan dan mengadopsi semua langkah dengan konsensus sehingga semakin memperkuat

³⁹ *Ibid.*

kesatuan untuk pelaksanaan langkah-langkah tersebut. Contoh terbaik dari praktek ini adalah Undang-Undang Anggaran Republik Serbia tahun 2009 yang telah di persiapkan untuk jangka waktu lebih lama daripada di tahun-tahun sebelumnya, tepatnya demi kesatuan yang sangat dibutuhkan untuk implementasi langkah-langkah yang efisien dalam anggaran.⁴⁰

Sebuah implementasi yang efisien dari tindakan yang diambil pemerintah Serbia tersebut diarahkan pada efek mengurangi krisis ekonomi yang hanya mungkin jika langkah-langkah yang diusulkan tersebut diterima oleh warga Serbia. Maka untuk dapat mencapai hal tersebut, pemerintah perlu untuk mendistribusikan beban secara merata di antara kelompok kepentingan terbesar. Oleh karena itu, prinsip solidaritas telah diterima sebagai dasar untuk mendefinisikan langkah-langkah kebijakan ekonomi dan diimplementasikan secara ketat di semua bidang. Sebagai akibat dari kebijakan ini, pada tahun

⁴⁰ "The Economic Crisis and It's Impact on The Serbian Economy", dalam http://www.media.srbija.gov.rs/medeng/documents/economic_crisis280109.pdf, diakses 16 Juni 2011.

2009 pemerintah Serbia telah menyediakan anggaran yang sama untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi kelompok yang paling rentan.

Sesuai dengan kesepakatan *Stand-by Agreement* dengan IMF, untuk tahun 2009, pemerintah Serbia menekankan kebijakan pada:

- Memperketat sektor keuangan, dimana defisit pemerintah yang diproyeksikan pada 1 3/4% PDB dan disusul oleh konsolidasi keuangan pemerintah lebih lanjut pada tahun 2010. Kesemua ini mensyaratkan adanya kebijakan pendapatan yang ketat guna menjaga pertumbuhan anggaran gaji dan pensiun serta memperketat belanja yang tidak masuk prioritas yang dapat membantu menciptakan ruang manufer untuk mengembangkan investasi pada sektor infrastruktur.
- Menjaga pertumbuhan inflasi dan mempertahankan kebijakan rejim mata uang mengambang.
- Memanfaatkan akumulasi cadangan keuangan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi krisis keuangan.
- Melaksanakan kebijakan struktural guna mengatasi akar-akar permasalahan rendahnya kapasitas

produksi, tabungan dan ekspor.

Penetapan kebijakan tersebut di atas mengacu pada perkiraan menurunnya arus modal asing dan kredit domestik yang dapat menyebabkan melambatnya permintaan domestik, tingkat pertumbuhan dan inflasi serta menyempitnya ketidakseimbangan eksternal. Pertumbuhan PDB diproyeksikan turun menjadi 3,5% dan diharapkan naik pada tahun 2010. Inflasi diperkirakan sebesar 8% pada tahun 2009 dan anggaran pendapatan diproyeksikan mencapai US\$ 698,7 milyar sementara anggaran belanja mencapai US\$ 748,3 milyar.⁴¹

Selain itu, langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan oleh Pemerintah Serbia harus disesuaikan dengan kebutuhan tertentu dari pasar Serbia, tidak bisa hanya mengambil dan mencontoh dari tindakan-tindakan yang diimplementasikan di negara-negara kawasan atau global, karena penyebab krisis di masing-masing negara berbeda. Kebijakan masing-masing daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: (A) Negara (dalam

⁴¹ "Serbia, peluang ekonomi di luar negeri", *Loc. Cit.*

arti luas); (B) Ekonomi (sektor industri dan keuangan); (C) Populasi umum.

Upaya insentif dari pemerintah Serbia akan terus ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah serta pengusaha, yang diikuti oleh pengawasan dan kontrol ketat atas penggunaan dana, khususnya dalam hal hasil yang dicapai. Selain itu, untuk mengurangi defisit perdagangan luar negeri, kegiatan perekonomian yang berorientasi pada bidang ekspor, pada umumnya akan didukung oleh pemerintah Serbia terutama dalam menghadapi persaingan di segala bidang.

Pemerintah Serbia juga memberikan Perhatian khusus bagi investasi asing yang cukup signifikan dalam mendorong tindakan-tindakan non-keuangan di bidang peraturan, penciptaan kondisi yang menguntungkan daerah dan insentif kerja baru. Di Sektor keuangan, pemerintah akan memberikan jaminan sebagai dasar untuk pelaksanaan langkah-langkah insentif tertentu dalam sektor industri serta insentif sementara bagi rekening tabungan warga juga akan diperkenalkan, dimana hal ini menjadi sumber utama kegiatan investasi nasional.

Dalam sektor negara, secara keseluruhan pemerintah akan menerapkan langkah-langkah ekonomi dengan mempertimbangkan tingkat keseluruhan belanja publik dan juga beberapa komponen individu. Pengeluaran kebijakan publik secara keseluruhan harus berkontribusi pada daya saing ekonomi dalam hal negara-negara lain di kawasan dan tidak harus menjadi faktor ketidakstabilan makroekonomi dengan cara apapun. Dalam hal tertentu, pemerintah menghabiskan aturan umum pada tindakan penghematan yang harus dilakukan dalam pengeluaran, sedangkan belanja yang bersifat mendorong harus sangat hati-hati diproyeksikan.

Karakter sosial negara akan sepenuhnya menegaskan bahwa kelompok yang paling rentan populasinya akan diberikan perlindungan berupa pemberian subsidi. Jumlah subsidi yang diberikan akan dibatasi dan penggunaan subsidi tersebut akan berada di bawah pengawasan yang lebih ketat.

Sedangkan dalam sektor umum, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah Serbia akan disesuaikan dengan pendapatan negara saat ini dan untuk tingkat yang lebih besar, dari pendapatan negara di tahun-tahun sebelumnya. Efek dari tindakan yang diambil pemerintah tersebut harus

memberikan kelanjutan dari pertumbuhan PDB yang juga berarti kesinambungan dalam pertumbuhan pendapatan penduduk. Secara umum, semua tindakan yang akan diambil dalam sektor ekonomi dan negara tersebut dirancang untuk menjaga standar hidup penduduk dan krisis yang melanda, dimana negara melihat krisis ini sebagai perlambatan perekonomian negara dan bukan sebagai penurunan drastis dalam standar hidup.

Tindakan ataupun kebijakan lainnya yang diambil oleh pemerintah Serbia dalam bidang ekonomi, yaitu:⁴²

1. Meningkatkan likuiditas perekonomian melalui:

- Pemberian jaminan berdaulat sebesar 40 miliar dalam mata uang dinar untuk kepentingan Bank Nasional Serbia yang akan menyetujui pinjaman kepada bank-bank yang kemudian akan menawarkan pinjaman untuk bisnis yang menguntungkan;
- Insentif pinjaman dari Dana Pembangunan dalam jumlah 18,7 miliar dinar;
- Pinjaman Internasional untuk pembangunan infrastruktur:

⁴² "The Economic Crisis and It's Impact on The Serbian Economy", *op. cit.*

(a) Bank Dunia: sebesar 388 juta euro

(b) EIB - EUR: sebesar 540 juta euro

(c) EBRD - EUR: sebesar 150 juta euro

- Pinjaman yang menguntungkan untuk pengembangan usaha kecil dan menengah (pinjaman APEX) dalam jumlah sebesar EUR 250 juta;
- Dalam kerjasama dengan NBS, menerapkan paket kebijakan yang akan menyebabkan likuiditas yang tinggi di sektor perbankan untuk tumpah ke dalam perekonomian.

2. Meningkatkan ekspor melalui:

- Menyediakan modal kerja dengan persyaratan yang menguntungkan untuk mempengaruhi kegiatan ekspor;
- Sebuah tingkat yang lebih tinggi dari kontrak asuransi ekspor;
- Menghilangkan kebiasaan dan hambatan tugas;
- Dukungan keuangan untuk sertifikasi produk;
- Mendukung eksportir dalam mencari pasar baru di negara-negara yang tidak memukul keras oleh krisis, yaitu mereka yang mempertahankan tingkat pertumbuhan yang tinggi.